

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara



Oleh :

**RINA AGUSTINA
07011181320071**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Kinerja Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan*” telah dipertahankan dihadapan Tim Pengudi Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 November 2018

Indralaya, 13 November 2018

Ketua :

1. Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 19661230 199203 2001

Anggota

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2001
2. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 19590520 198503 2003
3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827 200912 1002

Mengetahui,

Dekan FISIP

Prof. Dr. Klegus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 19810827 200912 1002

ABSTRACT

This research is based on the background of the problem of the absorption of a less than optimal budget, the occurrence of budget duplication, and the inefficient funds used. This study aims to determine the performance of the budget expenditure of the National Unity and Political Body of the Province of South Sumatra. This research is entitled "Performance Analysis of National Unity and Political Unity Budget Expenditures of the Province of South Sumatra". The concept used is Value For Money from Mahmudi, which includes economic dimensions, efficiency and effectiveness. The method used is descriptive quantitative method. Data collection techniques include questionnaires and documentation. The data analysis technique used is the central tendency test, dispersion test and histogram. The results of this study indicate that the budgetary performance of the National and Political Unity Agency of South Sumatra Province is not good; because the economic dimension is at a less economical percentage, the efficiency dimension is at a very efficient percentage, the effectiveness dimension is in the less effective percentage, this shows that the use of existing financial resources is less economical, the activities and programs implemented are very efficient, the benefits generated from the ineffective output, it is recommended that the National and Political Unity Agency of the Province of South Sumatra to save budget planning, produce better output with the lowest expenditure, pay attention to the planning and implementation of programs and activities and benefits to be produced.

Keywords: Performance, Budget, Regional, Expenditures, Economy, Efficiency, Effectiveness

Advisor I



Dr.Lili Erina,M.Si
19661230 199203 2001

Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
19691119 199803 2001

Indralaya, November 2018
Chairman of Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan penyerapan anggaran yang kurang optimal, terjadinya duplikasi anggaran, serta belum efisiennya dana yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini berjudul "Analisis Kinerja Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan". Konsep yang digunakan adalah *Value For Money* dari Mahmudi, yang meliputi dimensi ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data meliputi kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji *central tendency*, uji *dispersion* dan histogram. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan kurang baik; dikarenakan pada dimensi ekonomi berada pada persentase kurang ekonomis, dimensi efisiensi berada pada persentase sangat efisien, dimensi efektivitas berada pada persentase kurang efektif, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan yang ada kurang ekonomis, kegiatan dan program yang dilaksanakan sangat efisien, manfaat yang dihasilkan dari *output* kurang efektif, maka disarankan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penghematan perencanaan anggaran, lebih menghasilkan *output* yang baik dengan pengeluaran biaya yang serendah-rendahnya, memperhatikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta manfaat yang akan dihasilkan.

Kata kunci : Kinerja, Anggaran, Belanja, Daerah, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

Pembimbing I



Dr.Lili Erina,M.Si
19661230 199203 2001

Pembimbing II



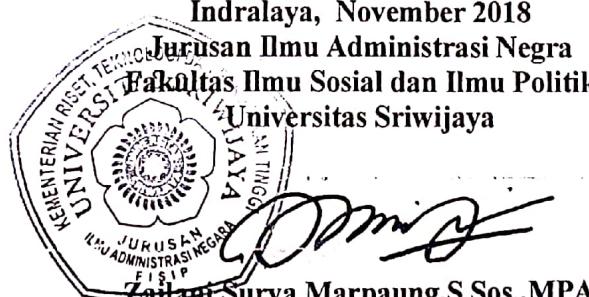
Ermanovida, S.Sos., M.Si
19691119 199803 2001

Indralaya, November 2018

Jurusan Ilmu Administrasi Negra

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung,S.Sos.,MPA

19810827 200912 1002

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

“Yakinlah bahwa ada kemudahan dibalik kesulitan, dan ada sepetik hikmah dalam setiap cobaan. Percayalah, Allah senantiasa merencanakan apa yang terbaik untuk hamba-Nya apapun itu” (QS.Insyirah: 5)

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak Masri dan Ibu Zaima yang telah menyekolahkanku dengan penuh kerja keras.**
- 2. Kedua saudaraku Aldi dan Reza, serta saudara sepupuku Winda dan Leni**
- 3. Sahabat-sahabatku Mardiah, Ulya, Lita, Ulkiyah, Tika, Indah, Diah, Elia, Reni, Anna, Maharani, Riski, Naomi, Rusmala, Tyas, Wulan, Amel, Deni**
- 4. Teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2013**
- 5. Dosen dan pegawai Fisip Unsri**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Kinerja Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan*”.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu syarat guna menempuh derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga saya yang memberikan motivasi, semangat serta doa dalam penyelesaian skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
6. Ibu Dr. Hj. Nurmah Semil, M.si selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
7. Ibu Dr. Lili Erina, M.Si selaku Pembimbing I skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, nasehat dan ilmunya guna kelancaran skripsi penulis.
8. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, nasehat dan ilmunya guna kelancaran skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas segala ilmu yang telah diberikan, serta seluruh staf

pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu kelancaran kuliah penulis.

10. Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengizinkan dan memberikan waktu dan informasi bagi penulis dalam melakukan penelitian skripsi.
11. Sahabat-sahabat terbaik Mardia, Ulya Syafitri, Lita Lusiana, Atika Sari, Indah Sari, Ulkiyah, Elia Eliza, Rizki Sunarti, Reni Anggraini, Deni Kurniawan, Anna Maliah, Maharani Mutiara, Rizki Ahida Suryani, Rusmala Dewi, Ade Wulandari, Dwi Retno Handayani (Rere), Amelia Veranica, Sanita Naomi Vince, dan teman-teman AN 13.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna menyempurnakan skripsi ini dikemudian hari. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, November 2018

Rina Agustina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
A. Landasan Teori.....	12
1. Kinerja	12
a.Pengertian Kinerja	12
b.Pengukuran Kinerja.....	13
2. Penganggaran	14
a.Pengertian Anggaran	14
b.Prinsip Penganggaran.....	15
c.Anggaran Berbasis Kinerja	16
3. Belanja Daerah	17
a.Penganggaran Belanja Daerah	17
b.Analisis Standar Belanja.....	20
4. Penentuan Kinerja dalam Penganggaran.....	20
5. Pengukuran Kinerja dengan value for money	21
B. Penelitian Terdahulu	23
C. Kerangka Pemikiran.....	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Definisi Konsep	26
C. Definisi Operasional	27
D. Instrumen Penelitian	27
E. Jenis dan Sumber Data	29
F. Populasi dan Sampel.....	30

G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Teknik Analisis Data	31
I. Sistematika Penulisan	34
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum.....	36
1. Visi dan Misi Instansi	36
2. Struktur Organisasi Instansi	36
3. Tugas dan Fungsi Bidang Intansi.....	39
4. Susunan Kepegawaian	51
B. Hasil dan Pembahasan	60
C. Uji Validitas.....	62
D. Uji Reliabilitas	63
E. Deskripsi Variabel Kinerja Anggaran Belanja	64
1. Deskripsi Dimensi Ekonomi.....	65
2. Deskripsi Dimensi Efisiensi	69
3. Deskripsi Dimensi Efektivitas	71
F. Uji <i>Central Tendency</i>	75
G. Uji <i>Dispersion</i>	76
H. Histogram	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	xv
LAMPIRAN	xvi

DAFTAR TABEL

Halaman

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
Penilaian Kinerja 3E	19
Penelitian Terdahulu	20
Definisi Operasional.....	23
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan	47
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Usia	48
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan.....	49
Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Daftar Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel	51
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	53
Skala Pengukuran Likert	54
Hasil Uji Validitas Data	55
Hasil Uji Reliabilitas Data.....	56
Kriteria Kinerja Ekonomi.....	57
Deskripsi Dimensi Ekonomi	58
Deskripsi Umum Dimensi ekonomi	60
Kriteria Kinerja Efisiensi	61
Deskripsi Dimensi Efisiensi	62
Deskripsi Umum Dimensi Efisiensi	64
Kriteria Kinerja Efektivitas	64
Deskripsi Dimensi Efektivitas.....	65
Deskripsi Umum Dimensi Efektivitas.....	67
Deskripsi Umum Variabel Kinerja Anggaran	68
<i>Frequencies Central Tendency</i>	69
<i>Frequencies Dispersion</i>	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel	5
Kerangka Pemikiran Analisis Kinerja Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	21
Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	34
Histogram Kinerja Anggaran.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi	85
Surat Penunjukkan Pembimbing Seminar Proposal	86
Lembar Bimbingan Skripsi	87
Lembar Revisi Ujian Komprehensif	88
Surat Permohonan Izin Penelitian	89
Kuesioner (Angket)	90
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab XI	92

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anggaran Berbasis Kinerja
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASB	: Analisis Standar Belanja
Bankesbangpol	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
Permendagri	: Peraturan Kementerian Dalam Negeri
Perpres	: Peraturan Presiden
Renja	: Rencana Kinerja Tahunan
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPSS	: <i>Statistic product and Service Solution</i>
S1	: Strata 1
S2	: Strata 2
UU	: Undang-Undang
VFM	: <i>Value For Money</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* (perencanaan strategis) suatu organisasi (Mahsun, 2006:26). Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolokukurnya.

Kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja yang baik harus introspeksi diri demi tercapainya kinerja yang lebih baik kedepannya, bekerja sesuai posisi, porsi dan job masing-masing.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Kinerja Instansi Pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Kinerja keuangan yang baik adalah kinerja yang efektif, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Bab XI pasal 280 yang digunakan

sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola dana secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Kinerja keuangan juga mencakup kinerja anggaran, karena anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintah. Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009:61).

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan (Halim & Iqbal, 2012). Anggaran yang disusun memuat keterangan antara lain:

- a. Standar yang diharapkan menurut fungsi belanja
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan
- c. Persentase dari jumlah pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal atau pembangunan.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah disusun agar berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* dari *input* yang direncanakan, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Permasalahan yang sering terjadi pada anggaran belanja di sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Inefisiensi.

Inefisiensi adalah dimana anggaran negara dibelanjakan lebih banyak dari yang seharusnya atau dibutuhkan. Indikasinya dapat terlihat dari adanya tumpang tindih kegiatan, biaya yang dibebankan melebihi standar biaya, hingga terjadi tindakan yang melanggar hukum seperti *mark up* atau manipulasi harga. Pengalokasian anggaran yang kurang efisien juga sering terjadi.

2. Penyerapan anggaran yang kurang optimal

Rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun, dan kemudian di genjot diakhir tahun hampir terjadi disemua pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Secara sederhana, penyerapan anggaran adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya. Penyerapan anggaran yang rendah, menyebabkan dana tidak cepat tersalurkan kepada masyarakat dan tidak tersalur ke sistem perekonomian daerah, sehingga penerima manfaat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang dibiayai dari dana tersebut secara tepat waktu.

3. Duplikasi anggaran.

Duplikasi anggaran adalah kegiatan yang sama yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan secara berulang-ulang oleh satuan kerja instansi pemerintah. Duplikasi yang sering terjadi adalah kegiatan yang sama dengan *output* yang sama dianggarkan beberapa kali dalam satuan kerja instansi pemerintah.

4. Masih kurang berorientasi kepada *output*.

Output atau keluaran merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program dan aktivitas. Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas.

Permasalahan yang sering terjadi bahwa penganggaran yang dilakukan kurang berorientasi terhadap *output*, atau *output* yang dihasilkan tidak sebanding dengan apa yang dianggarkan.

5. Masih rendahnya persentase untuk belanja modal.

Masih rendahnya penyeraan anggaran belanja modal menjadi permasalahan di Instansi Pemerintahan. Belanja modal punya efek berganda yang besar dan hasilnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat Indonesia, karena ia berwujud proyek-proyek pembangunan pemerintah, ia berwujud pembangunan fisik termasuk infrastruktur penting. Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya penyerapan anggaran belanja modal adalah jeleknya infrastruktur yang sudah ada dan tidak ada penambahan yang signifikan dari sisi jumlah proyek infrastruktur baru.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepala daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sebagai salah satu SKPD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan juga dituntut dalam pencapaian kinerja anggaran yang baik, tetapi dalam kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan ditemukan adanya permasalahan. Permasalahan itu antara lain yaitu pengalokasian anggaran yang kurang efisien sehingga membuat penyerapan anggaran rendah, penurunan pagu anggaran yang mempengaruhi capaian indikator kinerja, dan persentase belanja modal yang masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

No	Program/Kegiatan	Tahun Anggaran					
		2014		2015		2016	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program pelayanan administrasi perkantoran						
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	7.161.400	10.000.000	7.426.900	5.000.000	4.966.000
	2. Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	169.334.00	110.691.581	169.000.000	121.469.29	167.400.000	113.834.264
	3. Penyediaan alat tulis kantor	200.000.000	199.700.000	200.000.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
	1. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	688.830.000	651.002.005	591.721.600	385.000.00		
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	85.000.000	84.432.500	200.000.000	162.000.000	100.000.000	98.800.000
	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor				100.000.000	75.000.000	74.960.000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan						
	1. Rapat teknis SKPD	100.000.000	99.400.000	150.000.000	150.000.000		
	2. Monitoring evaluasi dan pelaporan	145.000.000	140.723.650	250.000.000	250.000.000		
	3. Rakor Bankesbangpol Prov.Sumsel	195.000.000	194.975.000	250.000.000	250.000.000		
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						
	1. Pemantauan dan pelaporan aksi demo di Sumsel	150.000.00	149.875.500	200.000.000	200.000.000	104.000.000	103.560.000
	2. Fasilitasi tim terpadu penanganan gangguan keamanan	1.146.567.000	1.146.164.210	1.145.000.000	1.135.000.000	281.000.000	280.834.200
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan						
	1. Pengembangan pusat pendidikan wawasan kebangsaan di Prov.Sumsel	137.500.000	136.587.769	150.000.000	150.000.000	30.000.000	30.000.000
	2. Pembekalan kesadaran bela Negara	440.000.000	436.448.700	150.000.000	150.000.000	69.400.000	67.733.000
6	Program keritraan pengembangan wawasan kebangsaan						
	1. Fasilitasi forum pembauran kebangsaan (FPK) Prov.Sumsel	61.900.000	61.521.900	550.000.000	479.181.200	85.700.000	84.542.000
	2. Fasilitasi forum kewaspadaan diri masyarakat	53.142.000	52.619.400	250.000.000	248.680.200	83.500.000	83.475.000
7	Program pendidikan politik masyarakat						
	1. Pembekalan peningkatan pemahaman pendidikan politik dan etika budaya politi	163.000.000	154.869.940	200.000.000	199.778.000	138.800.000	134.030.000
	2. Pendidikan politik bagi generasi muda dan pelajar di Sumsel	237.000.000	225.238.350	100.000.000	0		
	3. Publikasi pendidikan politik melalui media			200.000.000	200.000.000	68.000.000	67.956.000

Gambar 1. Program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1 menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada program yang ada di Bankesbangpol Provinsi Sumatera Selatan yaitu terlihat pada program pendidikan politik bagi generasi muda dan pelajar di Sumsel. Pada tahun 2014 Bankesbangpol Provinsi Sumsel mempunyai program pendidikan politik bagi generasi muda dan Pelajar di Sumsel dengan pagu anggaran sebesar Rp 237.000.000 dengan realisasi anggaran Rp 225.238.350 yaitu 95,04 persen, sedangkan pada tahun 2015 program ini memiliki anggaran sebesar Rp 100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0 yaitu sebesar 0 persen dari jumlah anggaran. Realisasi anggaran belanja program ini jauh dari target, berarti ada dana yang tidak digunakan, sehingga menimbulkan pengalokasian anggaran

yang dilakukan kurang efektif dan justru mengarah pada pemborosan. Berikut ini adalah data mengenai tingkat belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

Tabel 1. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2016

Uraian	Tahun Anggaran					
	2014		2015		2016	
	Target (Rp)	Real (Rp)	Target (Rp)	Real (Rp)	Target (Rp)	Real (Rp)
Total Belanja	18.821.136.000	18.289.438.536	19.912.756.000	18.129.758.295	7.660.903.230,83	6.785.133.353
Belanja tidak langsung	4.831.136.000	4.643.057.347	5.062.756.000	4.911.222.650	4.072.084.000	4.046.685.686
Belanja Langsung	13.990.000.000	13.646.381.189	14.850.000.000	13.218.536.645	3.588.819.230,83	3.459.118.723
Belanja Pegawai	162.150.000	143.800.000	223.900.000	138.700.000	13.800.000	13.800.000
Belanja Barang dan Jasa	11.566.890.000	11.285.606.684	13.947.700.000	12.461.189.605	3.575.019.230,83	3.445.318.723
Belanja Modal	2.260.960.000	2.216.974.505	706.921.600	618.646.040	0	0

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa untuk belanja modal mengalami penurunan drastis setiap tahunnya, pada tahun 2014 Rp 2.260.960.000 turun menjadi 706.921.600 ditahun 2015, bahkan tidak adanya anggaran untuk belanja modal pada tahun 2016 yaitu Rp 0.

Belanja modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel belum mencapai persentase 30 persen, padahal belanja modal suatu instansi pemerintahan harus mencapai 30 persen sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 yang menyatakan bahwa belanja modal pemda harus mencapai 30 persen, belanja modalpunya efek berganda yang besar dan hasilnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat Indonesia, belanja modal berwujud proyek-proyek pembangunan pemerintah dan pembangunan fisik termasuk infrastruktur penting. Data pada tabel 1 juga menunjukkan adanya penurunan pagu anggaran total belanja yang terjadi pada tahun 2016 yaitu Rp 7.660.903.230,83, sedangkan pada tahun 2015 anggaran untuk total belanja yaitu Rp 19.912.756.000.

Berdasarkan kesenjangan antara fakta yang ada di lapangan ini diindikasikan bahwa kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan belum maksimal. Oleh karena itu harus diteliti lebih lanjut bagaimana kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni : “Bagaimana kinerja anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah : Untuk mengetahui kinerja anggaran belanja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat membantu perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya konsentrasi Administrasi Keuangan Negara dan Fiskal, dan dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja anggaran pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiloka, B. Riana, R. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negarai* : Palembang
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Ismail, Gusnar. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: PT INDEKS
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- _____. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- _____. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andy
- Rai, I Gusti, R. 2010. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta

Peraturan-peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Nasional

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah

Permendagri No.27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD

Skripsi

Assidiqi, Bahrin. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012.* Skripsi diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

Wandira, Ayu. 2015. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palembang.* Skripsi diterbitkan. Palembang: Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas IBA

Binardini, Ajeng. 2016. *Kinerja Anggaran Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.* Skripsi diterbitkan. Palembang: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNSRI

Maha, Nova Enya. 2016. *Value For Money Dana Alokasi Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sri Bandung Kabupaten Banyuasin Tahun 2014.* Skripsi diterbitkan. Palembang: Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNSRI

Internet

<http://eprints.ung.ac.id/4653/6/2012-162201-241408079-bab2-130802012112859.pdf>
diakses pada 16 September 2016

<http://theorykeuangandaerah.blogspot.co.id/2015/12/kinerja-keuangandaerah-html> diakses pada 18 November 2016

www.kesbangpolprovsumsel.go.id diakses pada 29 November 2016

www.beraukab.go.id-download-files diakses pada 11 Desember 2016

repository.unhas.ac.id diakses pada 13 Februari 2017

eprints.uny.ac.id diakses pada 8 April 2017

<http://media.neliti.com> diakses pada 2 Februari 2018

<http://www.scribd.com> diakses pada 18 Maret 2018

repository.upi.edu diakses pada 15 Mei 2018